

PERANAN TUHAPEUT DALAM RANGKA MENCIPTAKAN HARKAMTIBMAS

A. ICHSAN

Fakultas Hukum Andalas Padang Sumatera Barat

Abstract

In societal life not rarely experience of trouble of Kantibmas the including criminal in the middle of society as one of the way of accomplishment of requirement like robbing, stealing, threaten with weapon. Because of society citizen have stick habit do not impinge regulation of custom and religion. What share in teaching religion teaching and custom is Tuhapeut. At Recently role of this tuhapeut experience of resistance so that kriminal impress to go up sub-province of Simeulue. Problem of this research is how role of Tuhapeut in order to creating Harkamtibmas? Role Of Tuhapeut To Prevent Kriminal In Order To Creating Harkamtibmas:

Result of research show society citizen do not entangle all tuhapeut in solving of the problem of in Countryside because of all Tuhapeut figure authority do not at epoch first, this happened because shifting value him civilization of human being, because of there are some all Tuhapeut have made many mistake in the middle of society, during the time do not be effective so its Organization, all Tuhapeut do not have strong authority only just public spirited so that in its performance impress justly to come from, this happened because less care attention him of governmental side in this case Lawcourt of Syari'Ah less effective socialize to society.

Keyword : Role, Tuhapeut, Harkamtibmas.

I. PENDAHULUAN

Dalam Kehidupan bermasyarakat di Indonesia rakyatnya melaksanakan segala upaya untuk mendapatkan penghidupan yang layak, pemerintah dalam hal ini mulai zaman orde baru sampai dengan zaman reformasi telah melakukan program mulai dari program pemerintah yang bersih, dengan pelaksanaan Demokrasi yang baik mengembangkan pertumbuhan Ekonomi diber-

bagai Usaha. Perluasan tenaga kerja pendirian Industri, Pembangunan

Pertambangan, perkebunan, Pertanian, dan pengelolaan sumber hayati dan sumber laut. Hal tersebut untuk mempermudah warga dalam memenuhi hidupnya untuk mendapatkan kesejahteraan. Dalam pencapaian itu masih diperlukan situasi yang kondusif, maksudnya setiap mendapatkan sesuatu itu tidak datang dengan sendirinya masih memerlukan pengolahan dengan tenaga yang memadai, prasarana, waktu, agar mendapatkan hasil

yang maksimal dalam satu kegiatan. Untuk mengolah alam perlu tenaga ahli agar dalam pengolahannya tidak berdampak pada pengrusakan alam sekitar, tentu setiap individu/kelompok/negara perlu pendidikan sebagai dasar untuk memiliki kemampuan.

Di Kabupaten Simeulue ada suatu kebiasaan yang bisa dijadikan pelajaran yang dapat dikaji/diteliti untuk dipublikasikan kekhlayak ramai sebagai bahan study banding dan untuk disosialisasikan dan digunakan untuk wilayah yang membutuhkannya sebagai wadah memperbaiki kaidah-kaidah masyarakat, adapun yang dikaji atau diteliti adalah adanya Mahkamah Syari'ah yang berperan mencegah/menurunkan criminal ditengah masyarakat kabupaten Simeulue.

Berdasarkan data dari dinas Catatan sipil di informasi tentang kabupaten Simeulue. Pulau yang terletak selatan Provinsi Aceh yang memiliki penduduk kurang lebih 94000 Jiwa dengan luas wilayah daratan 2.125,12 KM2. yang dihuni oleh 6 suku antara lain : suku Aceh, Nias, Minang, Batak, Bugis, dan Jawa dengan mata pencaharian 1/3 PNS, 2/3 Bertani, nelayan dan Buruh bangunan. Karakteristik masyarakat agamais dan patuh adat.

Ekonomi masyarakat tergolong dibawah standar Nasional, kebutuhan pokok nasi dan sagu. Dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat, warga masyarakat Simeulue selama ini tergolong mudah karena adanya tanaman cengkeh yang subur namun karena pengaruh ekonomi global harga turun sehingga warga masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi hidupnya. Belakangan ini terjadi Tsunami dan Gempa, namun disisi lain warga masyarakat men-

dapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan seperti dibangunnya infrastruktur sekolah, perumahan, dan kebutuhan hidup oleh bantuan Internasional. Setelah berlangsung beberapa Tahun kemudian bantuan tersebut dihentikan sehingga masyarakat kembali kewalahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya masyarakat yang memakan sagu, dan menjual hak-haknya seperti rumah tanah dan lain-lain.

Namun dalam berkehidupan bermasyarakat tidak mengalami gangguan Kantibmas termasuk criminal ditengah masyarakat salah satu indikator masyarakat melakukan pemenuhan kebutuhan dengan segala cara seperti merampok, mencuri, menodong, dan lain-lain dikarenakan warga masyarakat sudah melekat kebiasaan tidak melanggar agama dan adat, yang sangat kuat kepada peraturan agama dan adat. Yang berperan didalam mengajarkan menekankan ajaran agama dan adat adalah Para *Tuhapeut*. Pada Akhir-akhir ini peranan tuhapeut ini mengalami hambatan sehingga kriminal terkesan naik dikabupaten Simeulue. Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan ialah Bagaimanakah peranan Tuhapeut dan Polri dalam bekerja sama untuk mencegah kriminal dalam rangka menciptakan Harkamtibmas kondusif selama ini di Kabupaten Simeulue ?

II. PEMBAHASAN

Pengertian Tuhapeut

Tuhapeut adalah suatu badan kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur

Agama, unsur Pimpinan Adat, unsur Cerdik Pandai yang berada di Gampong dan Mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada Geuchik (Kepala Desa) dan Imum Mukim dalam bidang Pemerintahan, Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di Gampong dan Mukim. (Abdullah Usman, *Kumpulan Perda/Qanun ttg penyelenggaraan kehidupan Adat*, Perda Prov. Aceh No.7 pasal 1 Tahun 2000, hlm. 17).

Berdasarkan Peraturan Qanun Aceh Nomor 5 Pasal 31 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim unsur-unsur yang terlibat dalam Tuhapeut adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Ulama ;
- b. Unsur Tokok Adat ;
- c. Unsur Pemuka Masyarakat ;
- d. Unsur Cerdik Pandai/Cendikia wan. (Burhanuddin Berkat, *Kumpu lan Perda / Qanun*, Dinas Syari'at Islam Singkil, 2006, hlm. 217).

Berdasarkan Peraturan Qanun Aceh No. 5 Pasal 35 Tahun 2003 tentang Tugas dan Fungsi Tuhapeut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan upaya Pelaksanaan Syariat Islam dan adat dalam Masyarakat;
- b. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya yang masih memiliki azas martabat ;
- c. Melaksanakan fungsi Legistasi yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan Keuchik (Kepala Desa) atas Reusam (Peraturan) Desa ;
- d. Melaksanakan Fungsi Anggaran ;
- e. Melaksanakan fungsi Pengawasan meliputi Pengawasan Terhadap Peraturan/Reusam Gampong atau Desa,

Pelaksanaan APBG, Pelaksanaan Keputusan dan Kebijakan lainnya dari Kepala Desa ;

- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kepada Pemerintah Gampong ;
- g. Pelaksanaan tugas dan Fungsi tersebut ditetapkan sesuai dengan peraturan tata tertib Tuhapeut Gampong. (Burhanuddin Berkat, *Kumpulan Perda/Qanun*, Dinas Syari'at Islam Singkil, 2006, hlm. 218).

Hubungan Polri dan Tuhapeut dalam Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di Polsek Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, menurut Bapak Bambang Sugiyanto sebagai Kapolsek Teupah Selatan mengatakan, ada tiga kekuatan yang ada di tengah masyarakat yang berbau jadi satu untuk menciptakan suasana aman di dalam suatu wilayah jika salah satu diantara tidak sejalan maka akan terjadi ketidaksinkronian didalam suatu program, tidak jauh beda dengan program Polri dalam menciptakan situasi kondusif di suatu wilayah jika warga tidak terima kehadiran program Polri tugas itu akan sia-sia. Oleh karena itulah setiap ada rencana harus betul-betul sudah matang untuk dilaksanakan, begitu juga dengan perpolisian masyarakat yang sudah dikumandangkan oleh Kapolri tahun 2002, bahwa upaya yang tepat untuk mengurangi kriminal adalah dengan meningkatkan Polmas di segala pelosok tanah air termasuk didalamnya program Polri di kabupaten Simeulue.

Perpolisian masyarakat yang pernah digalakkan yaitu dengan itulah FKPM (Forum Komunikasi Perpolisian

Masyarakat). Dimana program ini telah mengalami kendala sebab tidak begitu mulus dalam pelaksanaannya, dari keseluruhan program ini berhasil hanya 30%, dari seluruh wilayah yang dicanangkan diharapkan kriminal turun namun kenyataan tidak ada perubahan. Dikarenakan hal itu perlu dikaji diamati kembali apa kendala dan hambatan dilapangan untuk dievaluasi demi perbaikan tugas kedepan agar lebih mudah mengurangi kriminal.

Menurut beliau, setelah diamati dilapangan dengan menggunakan analisa mulai dari yang terkecil sampai dengan yang besar dapatlah ditentukan, bahwasanya ternyata ketiga unsur tersebut tidak ada hubungan yang harmonis disebabkan antara lain :

- a. Antara Polri dengan para Tuhapeut rendah koordinasinya.
- b. Para Tuhapeut tidak begitu berfungsi peranannya di tengah masyarakat dan jarang dilibatkan dalam menyelesaikan perkara di tingkat desa terkesan ditinggalkan.
- c. Polri tidak mempercayakan atau melibatkan Tuhapeut dalam menyelesaikan perkara di desa, dianggap menambahi problem.
- d. Tidak ada sosialisasi tentang batasan perkara apa-apa saja yang dapat disosialisasikan di tingkat Desa oleh para Tuhapeut.

Hambatan kaum Tuhapeut dalam aksinya di tengah masyarakat antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan dari Pemerintah tidak maksimal terkesan separuh hati seperti honor dan gaji rutin kepada para Tuhapeut
- b. Tidak dilengkapi dengan kewenangan yang tertulis.

- c. Prasarana dan dana yang diperoleh sangat minim
- d. Tidak semua warga masyarakat mengakui keberadaan Tuhapeut.

Menurut Bapak Bambang Sugi-yanto sebagai Kapolsek Teupah Selatan mengatakan, jika kita lihat keberadaan para Tuhapeut yang berada di desa ditengah warga masyarakat yang merasuk dalam jiwa warga tentu keberadaan mereka sangat di segani karena ke 4 (empat) Majelis tersebut berada dalam kehidupan mereka mulai dari bangun pagi dalam melaksanakan solat di mesjid ketemu dengan majelis agama jika mengikuti/memasuki acara nikah ketemu dengan alim ulama P3NTR dan jika diacara pesta ketemu dengan penasehat adat ketemu mejelis adat. Jadi hubungan para Tuhapeut mampu sangat kuat menggeser pikiran masyarakat jika kekuatan mereka dipergunakan maksimal karena begitu berakar dihati rakyat sampai akhir hayat mungkin aja ada dibenak warga karena kebaikan yang diberikan para Tuhapeut tidak mungkin terlupakan dan tertinggalkan, adapun hubungan Emosional itu sangat erat dikarenakan sudah ada hubungan bathin sejak warga mulai menguasai jati dirinya seperti antara lain :

- a. Warga mampu membaca Al-Qur'an karena Majelis Agama.
- b. Warga mampu membaca buku karena majelis pendidikan / Gurunya.
- c. warga mampu bersopan santun, beradat ,beretika dan telah diarahkan sejak kecil oleh kebiasaan ditengah masyarakat dan disumpah nikah menjadi orang tua yang disumpah oleh majelis adat.

Ketiga hal tersebut suatu hal yang tidak bisa dilupakan warga dan sudah menjadi ikatan dari batin, sehingga yang

terjadi apabila para Majelis menyarankan suatu hal kepada mereka sangat di dengar atau dihargai warga. Dalam kesempatan tersebut seluruh apa yang disarankan oleh majelis menjadi patokan untuk di ikutinya oleh warga.

Mengingat begitu dekat hubungan emosional antara para tuhapeut dengan warga jadi ini merupakan suatu kekuatan di tingkat desa yang dapat digunakan/ digiring untuk dipergunakan kearah yang lebih baik seperti keterlibatannya dalam meningkatkan mutu kehidupan untuk mempermudah kesejahteraan termasuk menciptakan Harkamtibmas di tingkat didesa.

Peranan Tuhapeut dalam Mencegah Kriminal dalam Rangka Menciptakan Harkamtibmas

Berdasarkan hasil penelitian di desa kampung air Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue menurut Bapak Ruslem selaku Kepala Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan menyatakan bahwa selama ini keberadaan mereka kurang di hargai dan jarang diikutsertakan dalam penyelesaian masalah-masalah di desa. Mereka dilibatkan hanya jika diperlukan seperti acara akad nikah resepsi pernikahan, acara besar agama, sangat sedikit hak para tuhapeut terlibat urusan desa, karena tidak dilibatkan menimbulkan pudarnya semangat para Tuhapeut dalam memberikan pelajaran seperti tidak semua tokoh agama berpartisipasi memberikan pengajaran pengajian Al-Qur'an di Desa, tokoh adat tidak semua dilibatkan dalam acara-acara perkawinan terkesan acara nikah telah bergeser dengan pola yang modern sehingga nasehat dari majelis adat tidak

begitu penting dan jika ada hanya seperti serimonial saja.

Menurut beliau, dalam hal penyelesaian masalah di desa banyak kecenderungan masyarakat jika ada masalah yang berhubungan dengan hukum dilarikan persoalan tersebut ke Polres/Polsek begitu juga bagi mereka yang dilaporkan mencari bantuan hukum kepengacara tanpa konfirmasi dengan tokoh masyarakat yang ada di Desa. Penasehat hukum belakangan ini tumbuh berkembang pesat sampai di tingkat Kecamatan, tingkat desa sudah ada penasehat hukum, karena peranannya dan mudah ditemukan memudahkan warga menemukannya, alhasil yang berperan di tingkat desa untuk hal itu adalah Majelis agama dan cendikiawan tertinggal, karena mereka dianggap tidak memiliki sertifikasi bidang hukum, keberadaannya ditinggalkan sehingga menimbulkan kesan kurang dihormati karena latar belakang mereka tidak dilengkapi dengan kewenangan selama ini.

Menurut Bapak Ruslem selaku Kepala Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan mengatakan bahwa selama ini telah pudar perhatian warga kepada para Tuhapeut di tengah masyarakat dalam rangka membina agama, moral warga termasuk perilaku warga. Ini semua terjadi karena warga telah beralih kepercayaan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di Desa, ada dengan cara yang praktis langsung ke pihak yang berwajib seperti ke Polsek dan pengacara karena menurut mereka pelayanan dan penyelesaiannya lebih cepat namun tidak semuanya berhasil seperti yang diharapkan karena tidak tertutup kemungkinan bagi yang kalah akan banding, kasasi jadi urusannya bertambah panjang dan me-

nelan biaya yang banyak, warga masyarakat tidak mengetahui bahwa dalam mengurangi masalah tingkat desa harus tetap adanya keterlibatan tokoh yang berpengaruh karena tidak semua masalah itu harus selesai di ranah hukum. Dengan kejadian ini masyarakat telah lupa bahwa di Desa ada kekuatan hukum yaitu hukum adat dan agama yang dapat menyelesaikan perkara tanpa dilaporkan ke Polsek atau Polres asalkan diselesaikan dengan rasa damai kedua belah pihak dan tidak ada yang sudutkan, penyelesaian ini lebih baik dari pada ranah hukum karena tidak ada rasa dendam yang berkepanjangan.

Menurut beliau, mengatakan bahwa warga masyarakat tidak melibatkan para tuhapeut dalam penyelesaian masalah di Desa antara lain :

a. Para Tuhapeut tidak sewibawa tokoh pada zaman dulu, ini terjadi karena bergesernya nilai peradaban manusia, dikarenakan ada sebagian para Tuhapeut telah membuat banyak kesalahan di tengah masyarakat seperti :

1. Ada yang terlibat main judi togel.
2. Ada yang beristeri dua/poligami
3. Terlibat dalam hukum pidana.
4. Ada sifat malas dan apatis terhadap masyarakat.

Karena faktor tersebut diatas membuat mereka tidak dihargai ditengah masyarakat, sehingga warga yang memiliki masalah tidak percaya untuk dapat membantu masalahnya karena para Tuhapeut sendiri belum tentu mampu mengatasi problemnya sendiri.

b. Dari segi keagamaan

Banyak para Tuhapeut yang tidak mampu exis dalam dunianya, tidak bisa menjadi suritauladan untuk keluarganya apalagi untuk masyarakat, ini terjadi karena para ulama melaksanakan kemurkaan seperti :

1. Meninggalkan ajaran islam seperti tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak berpuasa, tidak membayar zakat.
2. Tidak memberikan pengajaran tentang pembacaan AlQuran dan ilmu-ilmu agama islam termasuk Aqidah dan zikir.
3. Tidak mendukung penyelesaian masalah dilingkungan Desa.

c. Dari segi Ekonomi

Para Tuhapeut tidak sewibawa dulu, zaman dulu para Tuhapeut rata-rata orang bangsawan berpendidikan yang memiliki kesejahteraan lebih yang mampu menolong warga miskin, mereka pemurah dan mudah kasihan. Para cendikiawan dulu memiliki kecendikiawan yang majemuk karena mereka terdiri dari tokoh yang disegani karena banyak pengalaman di desa tentang mengatasi masalah. Bergesernya zaman membuat mereka jatuh karena mereka termasuk yang dilanda masalah perang saudara dalam GAM ditambah dengan adanya bencana alam dan Tsunami ini termasuk hal yang menyedihkan sehingga warga miskin termasuk para tuhapeut, adapun penyebab para Tuhapeut tidak disegani dari segi Ekonomi antara lain :

1. Para Tuhapeut tidak memiliki pekerjaan tetap termasuk orang yang jatuh miskin, tidak mampu mengatasi kebutuhan keluarga-

- nya apalagi mengurus warga masyarakat.
2. Para Tuhapeut jika dimintai bantuan terlebih dahulu dibantu kebutuhannya baru kemudian bersedia membantu masyarakat.
 3. Para Tuhapeut tidak ada waktu renggang untuk mengurus masalah karena mencari nafkah
 4. Para Tuhapeut tidak memenuhi kapasitas dalam menangani masalah yang terjadi karena ilmu pengetahuannya yang rendah terbatas jadi dianggap tidak perlu karena hasilnya belum tentu berhasil.

d. Faktor Sosial Budaya

Selanjutnya Bapak Ruslem mengatakan bahwa dari faktor sosial dan budaya para Tuhapeut telah berubah karena banyak hal yang paling utama karena perubahan zaman yaitu adanya kemajuan yang tidak bisa ditahan dielakkan yaitu kemajuan zaman yang modern membuat warga tidak bisa membatasi dirinya dalam pengaruh global, karena kehidupan menuntut kebutuhan yang mendesak sehingga warga masyarakat harus kompetisi dalam meraih kesejahteraan semua sibuk dalam mencari nafkah, yang terjadi pengaruhnya adalah perubahan perilaku termasuk para Tuhapeut antara lain :

1. Para Tuhapeut telah memiliki sifat Ego yang berlebihan tidak perduli lagi dengan jabatan yang disandanginya kesannya memikirkan diri sendiri jabatan hanyalah sebagai fantasi kehidupan.

2. Para Tuhapeut terbawa arus dengan perkembangan budaya yang masuk, pada acara-acara pesta acara tradisional telah merubah ke arah yang sederhana dan singkat kaidah-kaidah dalam tatanan adat telah di persingkat mengarah pada gaya modern seperti dalam acara adat sudah banyak yang dilupakan mereka tidak keberatan bahkan mengahkan tidak dilaksanakan seperti nasehat adat dalam perkawinan padahal sangat penting sehingga warga banyak yang tidak setuju membawa perbedaan pendapat di masyarakat akhirnya timbul pergolakan kelompok-kelompok baru dan menentang para Tuhapeut dianggap sebagai pemicu selanjutnya tidak dihormati warga masyarakat.
3. Apatis dan Statis, adanya anggapan yang kuno bahwa dibuah para Tuhapeut menjadi ditinggalkan oleh warga karena tidak mau beradaptasi dengan perkembangan zaman, sebgaiian para Tuhapeut tidak mau berpola pikir yang rasional susah beradaptasi dengan warga pendatang sehingga kontra timbul ketidaksukaan warga yang masuk akhirnya warga yang urban mencari sendiri solusi jika ada masalah yang dihadapi langsung ke Polri atau penasehat hukum dan lain-lain enggan menyampaikan ke tokoh masyarakat karena para Tuhapeut tidak mau merangkul kaum pendatang. Sesuai dengan pengamatan di-

lapangan hal ini terjadi karena antara lain :

- a) Pudarnya ilmu dan pengetahuan para Tuhapeut di tengah masyarakat.
- b) Tidak mau berbaur dengan warga masyarakat terkesan jaga wibawa dan harus dihormati.
- c) Tidak melibatkan diri dalam penyelesaian masalah terkesan angkuh.
- d) Otoriter yang tidak pada tempatnya merasa berkuasa padahal jabatan sifat sosial dan zaman sudah berubah.
- e) Budaya yang statis tidak menerima perkembangan zaman maju, terkesan kontra pengaruh luar menantang terhadap perkembangan zaman.

Menurut Ibu Muthmainnah. WH sebagai Wakil Ketua Mahkamah Syari'ah Sinabang, mengatakan bahwa selama ini tidak begitu efektif Organisasinya dikarenakan beberapa hal antara lain :

- a. Terlambatnya Qanun/Perda yang mengatur tentang tugas dan Fungsi Mahkamah Syariah dalam memberikan kewenangan kepada Para Tuhapeut untuk menyelesaikan Perkara di tingkat Desa seperti perselisihan dalam rumah tangga dan yang terlibat khalwat.
- b. Terlambatnya dibuat struktur yang pasti tentang kedudukan Tuhapeut belum ada hanya bersifat sosial yang turun menurun.
- c. Selama ini tidak ada kepastian honor untuk Para Tuhapeut di Organisasi Mahkamah Syari'ah.

- d. Sewaktu pengangkatan perangkat Para Tuhapeut selama ini tidak ada peraturannya.
- e. Terhambatnya informasi Syarat untuk jadi para Tuhapeut belum ada tersosialisasikan ke masyarakat.
- f. Masyarakat enggan datang ke Mahkamah Syari'ah untuk koordinasi.
- g. Terlambatnya pemberian petunjuk dan teknik pelaksanaan tugas Tuhapeut di lapangan.
- h. Belum adanya MoU antara Mahkamah Syariah dengan Polri dalam hal ini Polres Simeulue.
- i. Belum optimalnya sosialisasi tentang tugas dan peranan mahkamah syari'ah di masyarakat dalam mengurangi kriminal.

Menurut beliau, karena keterlambatan tersebut terkesan para Tuhapeut tidak memiliki otoritas yang kuat hanya bersifat sosial saja sehingga dalam kinerjanya terkesan asal-asal saja, ini terjadi karena kurang pedulinya perhatian dari pihak pemerintah dalam hal ini Mahkamah Syari'ah kurang efektif sosialisasikan ke masyarakat. Majelis Ulama tidak memiliki kepastian yang tetap dalam kinerja sehingga menimbulkan keraguan akhirnya kinerja mereka tidak begitu optimal.

Mahkamah Syari'ah sebagai induk dari Majelis ulama, Majelis adat, Cendikiawan, Majelis Pendidikan/ Cendikiawan tidak begitu Exis di tengah masyarakat karena perangkat nya masih kurang termasuk didalam nya antara lain :

- a. Jumlah personil yang kurang
- b. Prasarana, materil yang belum memadai
- c. Biaya oprasional yang belum mencukupi

- d. Perangkat, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis belum terpenuhi sebagai pegangan.
- e. belum adanya MoU kerja sama Harkamtibmas dengan Polri.

Dari pernyataan tersebut diatas jika dalam prasarannya kurang dalam menunjang tugas Polri dalam mengurangi kriminal di kabupaten Simeulue di sebabkan keterbatasan yang ada.

Menurut Bapak Djailani sebagai Ketua Majelis Adat Aceh mengatakan bahwa kinerja para tuhapeut khususnya Majelis Adat dalam kinerjanya tidak optimal dikarenakan hal-hal antara lain :

- a. Terlambatnya terbit Qanun/Perda yang mengatur tugas fungsi dan kewenangan Majelis adat di Kewilayahan.
- b. Struktur kepengurusan tingkat desa belum ada
- c. Tidak ada kapasitas honor/gaji rutin.
- d. Belum ada sosialisasi tentang peranan para Tuhapeut
- e. Syarat untuk jadi para Tuhapeut tidak jelas
- f. Tidak ada honor yang jelas.
- g. Belum ada petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis atau latihan tugas Tuhapeut di tengah masyarakat.
- h. Belum adanya Mou dengan Polri tentang Harkamtibmas

Keterlambatan dan kurangnya Qanun yang mengatur tugas dan para Tuhapeut dibidang Adat menjadikan kinerja terkesan lambat karena hal-hal tersebut diatas.

III. PENUTUP

Peranan Tuhapeut Untuk Mencegah Kriminal Dalam Rangka Menciptakan Harkamtibmas:

- a. Warga masyarakat tidak melibatkan para tuhapeut dalam penyelesaian masalah di Desa antara lain :

Para Tuhapeut tidak sewibawa tokoh pada zaman dulu, ini terjadi karena bergesernya nilai peradaban manusia, dikarenakan ada sebagian para Tuhapeut telah membuat banyak kesalahan di tengah masyarakat seperti :

1. Ada yang terlibat main judi togel.
 2. Ada yang beristeri dua/poli gami
 3. Terlibat dalam hukum pidana.
 4. Ada sifat malas dan apatis terhadap masyarakat.
- b. Selama ini tidak begitu efektif Organisasinya
 - c. Para Tuhapeut tidak memiliki otoritas yang kuat hanya bersifat sosial saja sehingga dalam kinerjanya terkesan asal-asal saja, ini terjadi karena kurang pedulinya perhatian dari pihak pemerintah dalam hal ini Mahkamah Syari'ah kurang efektif sosialisasikan ke masyarakat. Majelis Ulama tidak memiliki kepastian yang tetap dalam kinerja sehingga menimbulkan keraguan akhirnya kinerja mereka tidak begitu optimal.
 - d. Kinerja para tuhapeut khususnya Majelis Adat dalam kinerjanya tidak optimal keterlambatan dan kurangnya Qanun yang mengatur tugas dan para Tuhapeut dibidang Adat menjadikan kinerja terkesan lambat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, PT, Rama Karya, Bandung, Tahun 1997.

Burhanuddin Berkat, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur dan Edaran Gubernur Aceh*. Banda Aceh, 2005

Djulaidy Kasim, *Kumpulan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 9, 12, 13, dan 14 tahun 2003*.

Hamid Zein, *Qanun Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama*. (penerbit, kota terbit, tahun)

Muchsin Raf, *Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Simeulue, MPU Kabupaten Simeulue, Sinabang tahun 2010*.

Razali M. Yusuf, *Bahan Penyuluhan Hukum*. DEPARTEMEN AGAMA RI tahun 2004

Zainal Abidin Abubakar, *Berbagai pandangan terhadap komplikasi Hukum Islam, cetakan Pertama*, Yayasan Al-Hikmah Jakarta, Jakarta tahun 1993.

Peraturan Perundang –undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI

Undang-undang No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-undang No.44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keisti-

mewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-undang No.11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Perkap Kapolri No.7 tahun 2008 Tentang Pedoman dasar strategi dan implementasi Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri.

Perkap Kapolri No. 8 tahun 2009 Tentang Implementasi prinsip dan standar Hak Azasi manusia dalam penyelenggaraan Tugas Polri.

Qanun/ Perda NAD nomor 3 tahun 2000 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Qanun Nomor 2 tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

Qanun Nomor 5 tahun 2003 Tentang tugas dan Fungsi TuhaPeut Gampong.

Qanun Nomor 4 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim

Sumber Lain

Internet :

<http://sahabat-amrin.blogspot.com/2011/03/peradilan-adat-aceh.html>

<http://www.acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/Tahun%202008/qanun%20aceh%20no%2010%20tahu%202008.PDF>